

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, Kehidupan dan Kesejahteraan manusia dapat meningkat, Dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah, unsur perbedaan potensi wilayah dengan wilayah lainnya (Tarigan 2004).

Sebuah Wilayah adalah suatu area geografis yang memiliki ciri tertentu dan merupakan media lokasi berinteraksi (Nugroho 2004). Terminologi Wilayah sangat longgar, bisa mempunyai makna sempit yang hanya mencakup tetangga atau makna luas yang mencakup pergaulan internasional. Luas dan sempitnya batasan makna suatu wilayah sangat tergantung pada tujuan analisis. Batasan suatu wilayah bisa hanya meliputi satu desa, suatu kecamatan, suatu kabupaten atau wilayah ekonomi yang melewati batas negara. Seperti diungkapkan Nugroho dan dahuri, ada 3 tipe wilayah (nugroho 2004). Wilayah Fungsional: adalah wilayah yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi. Wilayah Homogen: wilayah homogen adalah yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan dalam aspek tertentu. Wilayah Administratif: wilayah administratif yang dimaksud adalah wilayah yang selalu dikaitkan dengan pemerintah dalam rangka pengelolaan organisasi pemerintahan.

Dalam upaya mengetahui definisi Pembangunan Ekonomi. Pembangunan Ekonomi diartikan sebagai proses menciptakan Kemakmuran melalui mobilisasi modal, sumberdaya manusia, sumberdaya fisik, dan sumber daya alam untuk menghasilkan barang dan jasa yang diminta pasar. Definisi lain, agak singkat, dikemukakan Seers yang mengartikan pembangunan ekonomi sebagai sarana realisasi diri seseorang (Seers 1972). Agar realisasi diri tercapai, pembangunan harus bisa mencakup tiga hal. Mengurangi Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran, dan Mengurangi Ketidaksetaraan.

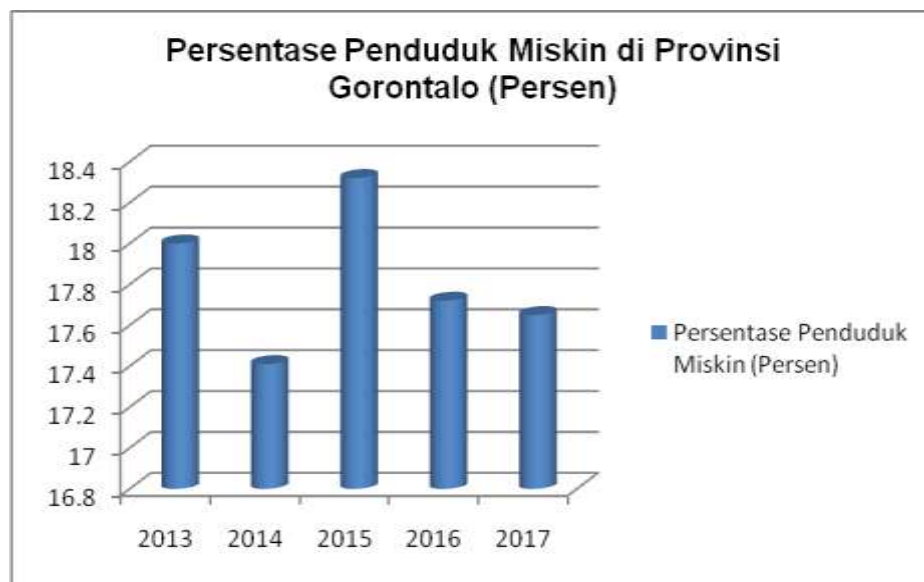
Akan Tetapi Kemiskinan di negara ini masih dalam angka yang cukup tinggi dilihat dari sumber-sumber data yang ada seperti kita mengetahui dari yang di sampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pada Senin (16/7/2018) lalu memperlihatkan disparitas atau perbedaan jarak yang signifikan untuk presentase penduduk miskin di kota sebesar 7,20% sementara di desa masih 13,20%. Kepala Badan Kebijakan fiskal (BKF) Kementrian keuangan Suahasil Nazara Menjelaskan, yang harus dipahami mengenai tingkat kemiskinan adalah jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi dengan jumlah penduduk di satu daerah. Sehingga, tingkat kemiskinan di satu tempat dengan tempat lain akan berbeda jika jumlah penduduknya. Itu memang akan ada variasi, jadi kalau dilihat seperti papua memang penduduknya sedikit, tetapi tingkat kemiskinannya bisa lebih tinggi karena jumlah penduduknya yang sedikit. Tapi kalau penduduk di jawa, tingkat

kemiskinannya rendah tapi jumlah penduduk relatif lebih banyak, kata Suahasil melalui konferensi pers di kementerian keuangan, Selasa (17/7/2018) malam. Yang Perihal disparitas tingkat kemiskinan ini memang masih menjadi PR pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari persentase jumlah penduduk miskin yang mencapai 9,82 persen atau untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di bawah 10 persen. Presentase penduduk miskin per Maret 2018 yang mencapai 9,82 persen setara dengan 25,95 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Perhitungan garis kemiskinan menyertakan dua komponen, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

Suahasil; (2018) menyebutkan, langkah yang terus dilakukan pemerintah guna meminimalkan jumlah penduduk miskin adalah dengan program yang dirancang tepat sasaran. Tepat sasaran dalam arti penerima program bantuan atau subsidi dari pemerintah terverifikasi memang hidup di bawah garis kemiskinan. “Program seperti Program Keluarga Harapan, Program Rastha (Beras Sejahtera), juga program lain termasuk program bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan, diberikan kepada nama dan alamat yang terverifikasi hidup di bawah atau sekitar garis kemiskinan,” tutur Suahasil. Jika program-program tersebut bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh mereka yang membutuhkan, maka secara perlahan kemiskinan dapat dikurangi. Suahasil meyakini, selama upaya mengurangi kemiskinan

pasti akan ada disparitas yang secara perlahan ikut berkurang menyusul efektivitas program bantuan dari pemerintah ke depan.

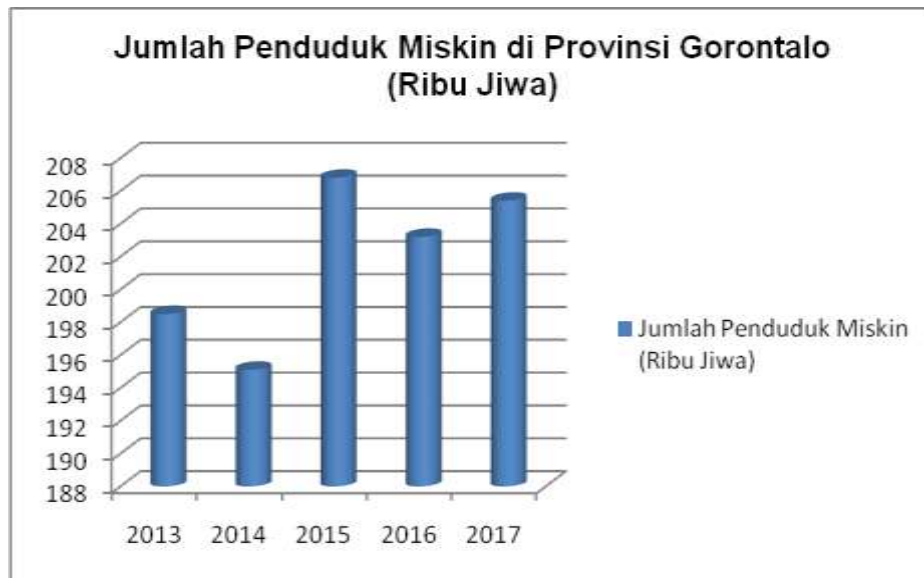
Kemudian kita pun bisa melihat data kemiskinan dari persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Gorontalo pada pada tahun 2013-2017.



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo (Persen).

Pada data di atas menunjukkan bahwa Hasil Persentase Penduduk miskin yang ada di Wilayah Provinsi Gorontalo dari tahun 2013-2017 mengalami turun dan naiknya persentase. di tahun 2013 presentase penduduk miskin sebesar 18%, di tahun 2014 persentase penduduk miskin turun menjadi 17,41%, dan tahun 2015 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 18,32%, pada tahun 2016 persentase

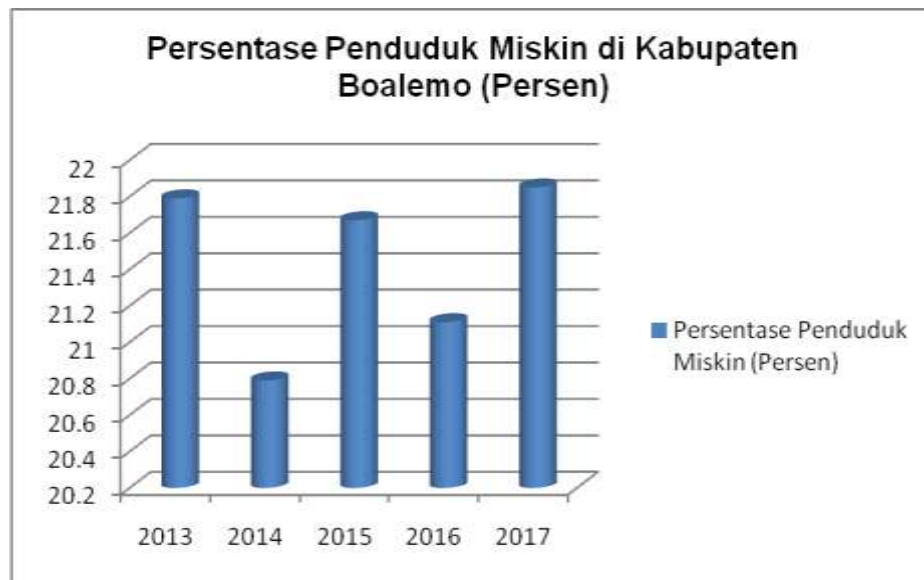
penduduk miskin mengalami penurunan yaitu 17,72%, dan pada tahun 2017 persentase penduduk miskin mengalami penurunan yaitu 17,65%.



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo (Ribuan Jiwa)

jadi kita bisa melihat pada data di atas yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dan penurunan, untuk tahun 2013 jumlah penduduk miskin yaitu 198,5 (ribu jiwa), di tahun 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu 195,1 (ribu jiwa), dan tahun 2015 jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Gorontalo Mengalami kenaikan sebesar 206,8 (ribu jiwa),

sedangkan di tahun 2016 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu 203,2 (ribu jiwa), dan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Gorontalo Mengalami Peningkatan sebesar 205,4 (ribu jiwa).



Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Boalemo (Persen).

Jadi pada data di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin yang ada di kabupaten boalemo mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2013-2017, di tahun 2013 persentase penduduk miskin yang ada di kabupaten boalemo sebesar 21,79%, untuk tahun 2014 persentase penduduk miskin mengalami penurunan yaitu 20,79%, pada tahun 2015 persentase penduduk miskin yang ada di kabupaten boalemo mengalami peningkatan sebesar 21,67%, sedangkan pada tahun 2016

mengalami penurunan yaitu 21,11%, dan pada tahun 2017 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 21,85%



Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Boalemo (Ribuk Jiwa)

Pada data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin (ribuk jiwa) yang ada di wilayah kabupaten boalemo dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dan penurunan, di tahun 2013 jumlah penduduk miskin yaitu 31.1 (ribuk jiwa), di tahun 2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu 30.5 (ribuk jiwa), untuk tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan 32.2 (ribuk jiwa), dan tahun 2016 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan 32.3 (ribuk jiwa), dan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin yang ada di kabupaten boalemo mengalami peningkatan sebesar 34.4 (ribuk jiwa).

Maka dari itu Lahirlah Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang desa, dimana Undang-Undang Desa telah menempatkan, desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Dan kita bisa melihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan anggaran dana desa di desa tanjung harapan dari tahun 2015-2017, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2016

Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo

| TAHUN | JUMLAH DANA DESA |
|--------------|-------------------------|
| 2015 | Rp.277.271.864 |
| 2016 | Rp.781.937.000 |
| 2017 | Rp.844.105.000 |

Dan berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaanya, Dana Desa Terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat yang ada di desa tanjung harapan, untuk itu kita bisa melihat hasil pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2

Hasil Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2015-2017

Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo

| KEGIATAN | JUMLAH |
|---------------------------|----------------|
| Jalan Tani | 7.400 M |
| Tong Sampah | 9 Unit |
| Perehapan Drainase | 150 M |
| Drainase | 300 M |
| Sekolah Paud | 1 Unit |
| Rabat Beton | 385 M |
| jamban | 29 Unit |

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak bisa dilakukan oleh aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat, Selain dari itu Tujuan Dana Desa adalah: meningkatkan Pelayanan publik di desa, Mengentaskan,

memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

dan kita bisa melihat data perbandingan dari Presentase Penduduk miskin menurut perkotaan dan perdesaan di wilayah provinsi gorontalo.

Tabel 1.3

Presentase Penduduk Miskin menurut Perkotaan-Perdesaan

Septemember 2016 – Maret 2018

| Tahun/Bulan | Kota | Desa |
|--------------------|-------------|-------------|
| September 2016 | 5,78% | 24,30% |
| Maret 2017 | 5,64% | 24,52% |
| September 2017 | 4,90% | 24,29% |
| Maret 2018 | 5,26% | 24.09% |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Jadi pada data di atas menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin dari perbandingan antara kota dan desa sangat berbeda jauh, kita bisa melihat pada september 2016 presentase penduduk miskin yang ada di kota sekitar 5,78% sedangkan yang ada di desa sebesar 24,30%, untuk maret 2017 presentase penduduk miskin yang ada di kota menurun sekitar 5,64% dari tahun sebelumnya dan presentase penduduk miskin yang ada di desa meningkat sebesar 24,52%, untuk September 2017 hasil presentase

penduduk miskin yang ada di kota menurun 4,90% untuk presentase penduduk miskin yang ada di desa menurun 24,29% dari hasil sebelumnya yang presentse penduduk miskinnya naik, dan pada maret 2018 presentase penduduk miskin yang ada di kota mengalami peningkatan sebesar 5,26% dari hasil presentase sebelumnya yang sempat turun, untuk presentase penduduk miskin yang ada di desa mengalami penurunan sekitar 24,09%.

Jadi dalam hal ini Perbandingan Presentase Penduduk Miskin menurut Perkotaan-Perdesaan masih cukup tinggi khususnya untuk Perdesaan di Provinsi Gorontalo Khususnya di Kabupaten Boalemo telah mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat, dana desa tersebut akan dibagikan dan diberikan di tiap masing-masing desa sesuai dengan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah Dan Tingkat Kesulitan Geografis, dalam Pengelolaan Sebaik-baiknya, agar Kualitas di masing-masing desa bisa meningkat dari segi SDM, Pembangunan Fisik (Infrastruktur), Pertanian, Perikanan dll, selain itu bisa memberikan nilai positif bagi desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut, kemudian dari data yang di dapat dari pemerintah Desa Tanjung Harapan, dari 834 Penduduk desa tersebut ada 102 penduduk yang masih tergolong miskin, oleh karena itu pada tahun 2018 desa Tanjung harapan Mendapatkan Dana Desa Sebesar: Rp,947.183.000,00 untuk itu, penulis mengambil judul tersebut agar bisa melakukan penelitian dalam pengelolaan dana desa dan agar kiranya pengelolaan dana desa tersebut

bisa meningkatkan perekonomian di desa Tanjung Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar Belakang di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kabupaten boalemo masih tinggi maka dengan adanya Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang desa, apakah pengelolaan dana desa di desa Tanjung Harapan dilihat dari program-program yang direncanakan dan akan dilaksanakan, akan memberikan peningkatan ekonomi pada masyarakat di desa tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas yaitu:

1. Apakah pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Harapan memberikan peningkatan ekonomi pada masyarakat di desa tersebut ?
2. Apakah program-program yang di rencanakan, disusun dan dilaksanakan, akan dirasakan oleh masyarakat desa Tanjung Harapan tersebut ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Harapan akan bisa memberikan peningkatan ekonomi pada masyarakat di desa tersebut.
2. Untuk mengetahui program-program yang di rencanakan, di susun, dilaksanakan, akan dirasakan oleh masyarakat desa Tanjung Harapan tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian secara Teoritis dan secara Praktis Sebagai Berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui Pengelolaan Dana Desa.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain untuk melakukan suatu penelitian pada pengelolaan dana desa pada objek penelitian yang sama.

b. Bagi Peneliti

Pada hasil penelitian ini, maka peneliti memahami dan akan lebih menambah wawasan pada penelitian dari pengelolaan dana desa.

c. Bagi pembaca

Untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan serta wawasan dari yang membaca hasil penelitian ini.